

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelaahan dan diskusi pada bab sebelumnya mengenai evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Wonogiri menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), pada bab terakhir ini penulis akan menguraikan inti dari hasil penelitian tersebut. Bagian ini menyajikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan mengenai efektivitas implementasi program, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat dipertimbangkan oleh BPBD Kabupaten Wonogiri maupun Pemerintah Desa dalam upaya penguatan kapasitas mitigasi bencana berbasis masyarakat di masa depan.

1. Perubahan Peran BPBD dari Pelaksana menjadi Koordinator Logistik: Program Destana di Wonogiri telah sukses mengubah cara penanganan bencana; dari sebelumnya masyarakat yang bersikap pasif dan "bingung" saat terjadi bencana, kini masyarakat (melalui Pokja Relawan) mampu melakukan evakuasi secara mandiri. Keberhasilan utama terletak pada BPBD yang kini sering hanya berfungsi menerima laporan kejadian yang telah diselesaikan di tingkat desa dan hanya perlu mengirimkan dukungan logistik.
2. Kesenjangan Kemampuan Teknis Relawan: Meskipun Wonogiri tercatat sebagai kabupaten pertama dengan 100% desa/kelurahan berstatus Destana (294 desa), dalam hal kualitas masih terdapat ketidakmerataan. Relawan di lapangan umumnya baru menguasai keterampilan dasar (evakuasi

seederhana), sedangkan keahlian teknis tingkat lanjut seperti penyelamatan air atau penyelamatan vertikal masih terbatas pada sejumlah individu saja.

3. Kelemahan dalam Administrasi dan Dokumentasi: Ditemukan bukti kuat bahwa kegiatan di desa berjalan (simulasi, sosialisasi, penanganan kejadian) secara operasional, namun dalam hal administrasi, pendokumentasian dan pelaporan kegiatan masih sangat lemah. Hal ini mengakibatkan monitoring formal oleh BPBD sering terhalang karena data tidak teradministrasi dengan baik di level desa.
4. Ketergantungan pada Komitmen Kepala Desa: Keberlanjutan anggaran Destana sangat bergantung pada pola pikir dan prioritas Kepala Desa dalam mengalokasikan Dana Desa (APBDes). Desa dengan perangkat yang mendukung cenderung memiliki kegiatan mitigasi yang aktif, sementara desa yang kurang komitmen hanya menjadikan Destana sebagai status administratif.

4.2 Saran

1. Spesifik Standardisasi SOP Operasional Desa: Mengingat belum semua elemen kegiatan tertuang dalam dokumen resmi di tingkat desa, BPBD perlu memfasilitasi penyusunan SOP (Prosedur Operasi Standar) yang sederhana dan aplikatif untuk setiap desa agar tindakan relawan memiliki dasar hukum dan prosedur yang seragam. Peningkatan Kemampuan Teknis Berjenjang: BPBD disarankan tidak hanya memberikan pelatihan dasar secara massal, tetapi juga melakukan pemetaan spesialisasi relawan. Contohnya, relawan di desa rawan longsor (seperti Tirtomoyo atau Karangtengah) diberikan

pelatihan teknis mengenai EWS dan evakuasi medan berat, sementara desa di sekitar Waduk Gajah Mungkur (seperti Desa Sendang) difokuskan pada penyelamatan air.

2. Digitalisasi Pelaporan Destana: Untuk mengatasi masalah administrasi, BPBD Kabupaten Wonogiri perlu mengembangkan sistem pelaporan digital yang memudahkan Pokja Relawan di desa untuk mengunggah dokumentasi kegiatan secara real-time. Hal ini penting agar proses monitoring dan evaluasi tidak hanya bersifat formalitas tahunan, tetapi berbasis kinerja harian.
3. Penguatan Regulasi Lokal (Perdes): Perlu adanya dorongan bagi setiap desa untuk membuat Peraturan Desa (Perdes) khusus Penanggulangan Bencana. Ini bertujuan agar alokasi anggaran mitigasi dari Dana Desa menjadi mengikat dan konsisten setiap tahunnya, sehingga tidak berubah-ubah mengikuti pergantian atau preferensi politik Kepala Desa semata.

4.3 Batasan Penelitian (Limitasi)

Penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya tidak melibatkan seluruh aktor yang terlibat dalam program Destana seperti pendamping program, sehingga informasi yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan keseluruhan proses implementasi program. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh desa di Kabupaten Wonogiri.

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat bagi peneliti mendatang, antara lain:

1. Cakupan Wilayah: Meskipun Kabupaten Wonogiri memiliki 294 desa/kelurahan yang seluruhnya sudah berstatus Destana, penelitian ini hanya melakukan studi mendalam di Desa Sendang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika kendala di desa-desa dengan topografi atau karakteristik sosial yang sangat berbeda dari lokasi penelitian.
2. Rentang Waktu Evaluasi: Evaluasi ini berfokus pada implementasi tahun 2025. Mengingat kebijakan anggaran desa dan struktur organisasi relawan bersifat dinamis, temuan dalam penelitian ini sangat terikat pada kondisi saat penelitian dilakukan dan mungkin akan berubah di tahun-tahun mendatang.
3. Ketersediaan Data Administratif: Terdapat batasan dalam mengakses dokumen laporan tertulis di tingkat desa karena sistem pendokumentasian relawan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Hal ini mengakibatkan analisis pada aspek "Process" banyak bergantung pada hasil wawancara dan observasi langsung dibandingkan data sekunder berupa laporan formal.
4. Subjektivitas Narasumber: Penilaian mengenai keberhasilan program dalam wawancara mungkin mengandung unsur subjektivitas dari pihak pengelola program maupun relawan. Peneliti telah berusaha melakukan triangulasi data, namun persepsi narasumber mengenai "kesiapan" bencana bersifat relatif.